

Gerakan Anti Kapitalisme Global

Eric Hiariej^{*)}

Abstract

Capitalism is contradiction. The flourish of liberal capitalism is met with a global scale of anti-capitalism, which ironically makes capitalism even stronger. Given the diversity of the the way in responding to capitalism embedded within globalization, this article reviews various ways of mapping anti capitalism movements, and assessing the implications of such diversity.

Kata-kata kunci:

anti kapitalisme; neoliberalisme; globalisasi; gerakan perlawanan

Kapitalisme adalah kontradiksi. Sekitar satu setengah abad yang lalu Marx menulis kapital hanya bisa diakumulasi dengan jalan penindasan. Karena itu perkembangan kapitalisme akan selalu bergandeng tangan dengan perlawanan terhadap eksploitasi dan keterasingan. Senada dengan itu Barry Gills (2000) menemukan paradoks dalam globalisasi ekonomi — yang bisa dilihat sebagai bentuk kapitalisme paling kontemporer. Ia bukan saja melemahkan, tetapi juga sekaligus mengaktifkan kekuatan-kekuatan perlawanan. Seperti yang tampak dalam krisis global pada 1998-99, ketegangan politik paling penting pada era yang akan datang adalah antara kekuatan globalisasi ekonomi yang sedang berusaha untuk memperluas pergerakan modal tanpa kendali dan kekuatan-kekuatan sosial perlawanan yang tengah

^{*)} *Eric Hiariej* adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

berupaya keras untuk mempertahankan dirinya dari terjangan neo-liberalisme. Gerakan-gerakan perlawanan, terutama yang muncul sejak Seattle 1999, sedang mendefinisikan kembali arti komunitas dan kehidupan bersama. Bahkan dengan melawan, gerakan-gerakan ini hendak membangun esensi solidaritas dan identitas kelompok. Sekalipun dunia saat ini tidak mudah ditaklukkan berkat ideologi neoliberal yang perlahan-lahan mulai menancap kuat. Namun justru penyeragaman yang dibawa neo-liberalisme membuat perlawanan menjadi mungkin dan diperlukan. Meniru ungkapan Albert Camus (Gills 2000: 3), bagi kebanyakan aktivis gerakan perlawanan dalam dunia yang serba seragam dan hegemonik, "[r]ebellion is the common ground on which every man bases his first value. I rebel-therefore we exist."

Munculnya perlawanan sosial membuat studi tentang fenomena globalisasi perlu mengalihkan fokus analisisnya dari sekedar isu-isu yang bersifat teknis menjadi persoalan yang penuh muatan politis. Sudah tidak memadai lagi studi kritis terhadap globalisasi dilakukan sesederhana mendokumentasikan *transnational neo-liberalism* mirip berbagai karya yang ditulis dan disadur David Held dan Anthony McGrew (2000; 2002; Held, McGrew, Goldblatt and Perraton 1999). Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memikirkan ulang pertanyaan tentang praktik-praktik sosial apa yang tengah membentuk strategi-strategi politik yang mewarnai ekonomi dunia. Fenomena globalisasi seharusnya dipandang dalam kerangka *collective human activity* (Cox 1997; Gills 2003) yang saling mengisi maupun berseberangan. Bukan lagi sekedar determinisme sejarah tentang ekspansi kapital maupun determinisme teknologi tentang kemajuan progresif di bidang komunikasi dan transportasi yang tak terelakkan. Globalisasi juga tidak cukup diterima sebagai pasar yang kian mengglobal atau dunia yang makin menyempit. Sebaliknya globalisasi berkenaan dengan upaya pemerintah dan pemilik kapital membentuk kembali tatanan ekonomi-politik dunia pasca resesi Fordisme (Hoogvelt 2001), yang tengah mendapat tantangan serius dari gerakan-gerakan perlawanan yang menolak tunduk pada orde dunia yang dipaksakan dari atas dan dilakukan secara sepihak.

Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan paradoks tersebut, terutama melihat secara lebih serius kembalinya kritisisme terhadap kapitalisme yang hampir mati dalam dua dekade

terakhir. Gagasan utamanya adalah kritisisme ini harus ditaruh dalam kerangka bangkitnya gerakan melawan kapitalisme yang terus mengglobal sejak dekade 1970an. Gerakan perlawanan itu sendiri perlu diperhatikan bukan saja karena skala dan jangkauan aktivismenya yang mampu menghentak perwakilan kekuatan kapitalisme global dan mengendurkan laju roda neo-liberalisme yang terus menerjang apa saja yang masih terbebas dari komodifikasi, tetapi juga lantaran keberagaman latar belakang aktivisnya, model aksi dan strategi yang dipilih. Beberapa pengamat—terutama yang mewakili kepentingan kelompok yang mapan—sering mencibir keberagaman ini sebagai ketidakjelasan yang membuat gerakan perlawanan tersebut lebih jelas dalam hal siapa yang dilawan ketimbang apa yang diinginkan. Sementara para pengamat yang lebih bersimpati justru menilai keberagaman ini sebagai kekuatan, setidaknya, yang menyulitkan kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk menundukkannya semudah keberhasilannya menghempas organisasi-organisasi kelas pekerja di Utara di awal 1980an. Akan tetapi sesungguhnya keberagaman dalam gerakan sosial adalah sebuah kenormalan. Dalam dua abad terakhir sejarah gerakan sosial menegaskan keberagaman yang sama mampu melahirkan beberapa revolusi bersejarah seperti Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Rusia, Revolusi Cina dan Revolusi Iran. Perbincangan tentang kembalinya kritisisme terhadap kapitalisme akan dimulai dengan cerita kemenangan kapitalisme liberal. Setelah itu pembahasan akan diteruskan dengan menggambarkan kebangkitan gerakan perlawanan. Bagian berikutnya memperhatikan secara khusus keberagaman gerakan perlawanan yang menjadi isu paling penting dalam beberapa tahun terakhir.

Kemenangan Kapitalisme Liberal

Di akhir tahun 1990an kapitalisme liberal tampil penuh kemenangan di atas puing-puing kebangkrutan rezim-rezim komunis yang terjadi satu dekade lebih awal. Francis Fukuyama (1992) menjelaskan perkembangan ini sebagai *the end of history*. Kegagalan komunisme menunjukkan bahwa tak satupun sistem alternatif yang progresif selain kapitalisme liberal yang cukup *feasible*. Hanya segelintir orang pada awalnya yang menyetujui neohegelianisme dan *reaganite triumphalism* yang menerangi argumen Fukuyama. Akan tetapi

sesungguhnya kebanyakan orang bisa menerima substansi gagasannya. Diantaranya, posmodernisme yang tertanam kuat dalam lingkungan akademi negeri-negeri berbahasa Inggris, jauh-jauh sebelumnya sudah mengumumkan kematian narasi besar dan datangnya dunia yang fragmentatif dan pluralis, yang mencurigai setiap upaya mengkritik habis kapitalisme liberal berpotensi mengembalikan horor *Auschwitz* dan *Gulag* (Callinicos, 2003).

Akan tetapi yang paling penting cara berpikir yang serupa juga tercermin dalam kebijakan publik. Di tahun 1990 ekonom John Williamson memperkenalkan istilah *Washington Consensus* (WC) untuk merujuk pada tidak lebih dari sepuluh wilayah kebijakan neoliberal yang diterima dan diterapkan hampir seluruh pengambil kebijakan di seluruh dunia. Selama periode kemakmuran 1950an dan 1960an sebagian besar kebijakan WC akan dilihat sebelah mata sebagai khayalan para ekonom gila yang bermimpi untuk kembali ke perekonomian dunia abad 19. Arus utama pemikiran pada waktu itu kuat dipengaruhi gagasan keynesianisme yang percaya stabilitas kapitalisme tergantung pada campur tangan negara untuk menjamin lapangan kerja penuh. Susan George (2000: 27) menulis "[i]n 1945 or 1950, if you had seriously proposed any of the ideas and policies in today's standard of neo-liberal toolkit you would have been laughed off the stage or sent to insane asylum."

Semuanya bermula dari resesi ekonomi pertama pasca perang yang mulai menimbulkan banyak persoalan di pertengahan 1970an. Melalui pertarungan politik dan ideologi neoliberalisme tampil menggeser keynesianisme sebagai ortodoksi ekonomi. Selama 1980an Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika berhasil memprakarsai kebijakan-kebijakan pasar bebas, memukul mundur perlawanan dari kelompok dominan yang selama ini diuntungkan keynesianisme maupun para pekerja, seperti yang tampak dalam kekalahan aksi mogok para pengawas lalu lintas udara Amerika di tahun 1981 dan para penambang Inggris di tahun 1984-85. Pada akhir 1980an dunia internasional praktis sudah berada di bawah cengkeraman neoliberalisme (Hoogvelt, 2001; Callinicos, 2003). Di satu sisi krisis hutang warisan resesi ekonomi besar kedua di awal 1980an memberikan keistimewaan yang diperlukan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk menekan pemerintah-pemerintah di negara-negara

berkembang agar menerima program penyesuaian struktural neo-liberal. Di sisi lain ambruknya komunisme memungkinkan Amerika khususnya untuk membujuk rezim-rezim baru di Eropa Timur dan Tengah untuk menjalani terapi kejut yang menyeret ekonominya dengan cepat dari model kendali negara dan bersifat autarki menjadi perekonomian yang selaras dengan tuntutan kompetisi pasar internasional (Callinicos, 2003).

Pada level global pemaksaan ortodoksi neoliberal sedikitnya mencerminkan sebuah strategi yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemerintah Amerika untuk mempertahankan hegemoni negaranya di era pasca perang dingin. Namun perlu dicatat kemenangan neoliberalisme juga diterima secara luas oleh sejumlah kelompok kiri. Ide Jalan Ketiga bermula sebagai simbol untuk membedakan *New Democrats* ala Bill Clinton dari *Reaganite Replublicanism* maupun pendekatan campur tangan negara yang dilakukan beberapa presiden dari kubu demokrat lebih dulu seperti Franklin Roosevelt dan Lyndon Johnson. Praktiknya, *New Democrats* tak lain dari komitmen Clinton terhadap neo-liberalisme seperti yang tampak dalam keberhasilannya, melalui aliansi dengan pengusaha-pengusaha besar dan faksi konservatif Partai Republik, membentuk NAFTA (Callinicos, 2003).

Diwartakan secara luas oleh Tony Blair bersama penasehat filosofisnya, Anthony Giddens, Jalan Ketiga menghendaki penerimaan terhadap apa yang disebut dengan desakan ekonomi. Globalisasi telah membuat solusi yang selama ini ditawarkan kelompok kiri, seperti redistribusi sosial dan pemilikan bersama menjadi tidak jelas dan ketinggalan jaman. Sebagai gantinya sebuah kelompok baru "kiri-tengah" harus menganut ortodoksi neoliberal dan kebijakan-kebijakan sosial yang bersifat otoriter yang dibalut dengan retorika-retorika komunitarian (Callinicos, 2001). Akibatnya, Jalan Ketiga "mengeluarkan politik dari politik". Karena neoliberalisme telah diterima sebagai keniscayaan debat politik yang tersisa hanya menyangkut isu-isu teknis yang tidak penting atau soal kepribadian pemimpin. Hilangnya perbedaan penting dalam program politik para elit nasional menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan mengejutkan yang diraih Jean Marie Le Pen. Boleh dibilang gagasan *the end of ideology* yang diumumkan secara prematur oleh Daniel Bell di awal 1960an tampaknya telah benar-benar terbukti. Perry Anderson (2000: 17)

menegaskan “[f]or the first time since the Reformation, there are no longer any significant oppositions—that is, systematic rival outlooks—within the thought-world of the West; and scarcely any on a world scale either, if we discount religious doctrines as largely inoperative archaism.”

Pernyataan ini menjadi tidak ada artinya karena sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi di akhir bulan November 1999 di Seattle. Organisasi Perdagangan Sedunia sedang berkumpul di sana untuk membicarakan agenda liberalisasi perdagangan jasa. Bank-bank investor dan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah berhasil mendesakkan privatisasi sedang mengincar sektor pelayanan publik yang sejauh ini relatif aman dari terjerangan neoliberalisme. Akan tetapi kemudian muncul sekitar 40.000-50.000 pengunjung rasa yang tak diundang yang berasal dari berbagai spektrum aktivis mulai dari serikat buruh Amerika yang terorganisir sampai sederetan aktivis NGO dan koalisi aktivis lain yang mengumandangkan isu-isu seperti lingkungan, perdagangan yang adil dan hutang dunia ketiga. Jumlah dan militansi para pengunjung rasa serta cara mengorganisir aksi yang inovatif yang mereka gunakan mengejutkan otoritas setempat (Barlow & Clarke, 2002). Perlawanan yang ditimbulkan membuat pemerintah negara-negara Barat—terpecah khususnya oleh sejumlah perselisihan antara Amerika dan Uni Eropa—sulit menemukan kata sepakat dalam ruang perundingan dan membangkitkan keberanian perwakilan negara-negara dunia ketiga untuk menentang kesewenang-wenangan negara-negara besar (Barlow & Clarke, 2002). Putaran negosiasi WTO gagal total dan derap langkah neo-liberalisme untuk sementara berhasil dihentikan.

Kembalinya Kritik Sosial

Unjuk rasa di Seattle tidak bisa dipandang sebelah mata, sekalipun para komentator neoliberal dan kelompok kiri lama yang dibuat terhenyak meremehkan para demonstran sebagai para pemberontak yang bersikap fanatik pada proteksionisme. Sebaliknya protes tersebut berhasil membangkitkan kembali kepercayaan jutaan orang di dunia untuk menentang neo-liberalisme. Salah satu simptom globalisasi adalah menjamurnya berbagai *summit* yang disimbolkan dengan sejumlah akronim seperti G8, IMF, EU, APEC, FTAA, dst. Protes sosial yang sengaja ditujukan untuk pertemuan-pertemuan internasional ini

menyebarkan tak terkendali—Washington, Millau, Melbourne, Prague, Nice, Gothenburg, Quebec City, Genoa, London, Barcelona, Doha, Cancun adalah kota-kota yang menjadi saksi hidup kelahiran kembali perlawanan terhadap kapitalisme liberal.

Jika hegemoni neo-liberal dimulai dengan dibukanya tembok Berlin pada 9 November 1989, maka hegemoni itu berakhir hanya dalam 10 tahun bersama dengan unjuk rasa di Seattle pada 30 November 1999. WC sudah tentu masih terus bertahan sebagai pedoman bagi para pembuat kebijakan, tetapi dominasinya mulai ditentang secara cukup intens. Seattle tidak menandai awal dari penentangan tersebut, walau unjuk rasa disana boleh dikata membawa resistensi yang tengah berkembang ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sekurangnya terdapat lima macam faktor atau peristiwa yang menjadi basis bagi perlawanan terhadap kapitalisme global yang sedang mengemuka sejak Seattle (Callinicos, 2003). *Pertama*, NAFTA merupakan perkembangan yang penting. Walau resistensi terhadap formasi blok perdagangan bebas ini tidak cukup berhasil, pembentukan NAFTA justru membantu memfokuskan perdebatan tentang globalisasi, terutama di Amerika. Akibatnya dominasi narasi liberal tentang globalisasi mendapat tantangan serius dari dua kubu yang bertolak belakang: para aktivis demokrasi yang berorientasi kiri dan kosmopolit di satu sisi dan kubu ultra nasionalis di sisi seberangnya. Kelompok pertama tak lain dari jaringan aktivis kiri yang berposisi terhadap NAFTA yang berjasa dalam mengorganisir dan memperluas perlawanan terhadap berbagai agenda pasar bebas yang terus bergulir hingga Seattle 1999.

Kedua, NAFTA juga penting artinya dari sisi lain. Peresmian blok dagang ini pada 1 Januari 1994 ditandai dengan perlawanan bersenjata di negara bagian Chiapas di bagian selatan Mexico. Subcommandante Marcos (Hayden, 2002: 216), pemimpin Zapatista Army of National Liberation (EZLN) yang melancarkan pemberontakan, mengecam NAFTA sebagai "*death sentence*" bagi etnis pribumi Meksiko sebab blok dagang ini dengan tegas memberangus hak asasi petani untuk memiliki akses ke tanah-tanah komunal. Tema utama propaganda Zapatista adalah nasib buruk komunitas pribumi Mexico yang ditimbulkan oleh neo-liberalisme. Dalam gambaran Marcos ia bersama masyarakat pribumi Mexico sedang melancarkan "perang dunia keempat" melawan globalisasi yang berperilaku sebagai "*the totalitarian extension of the logic*

of the finance markets to all aspect of life" (Marcos 2002: 273). Chiapas hanya salah satu dari sejumlah perlawanan terhadap neoliberalisme dari Selatan yang perlahan mulai menemukan bentuknya. Ken Saro-Wiwa yang ditembak mati rezim militer Nigeria di bulan November 1995 karena membela suku Ogoni dari berbagai kemalangan yang ditimbulkan oleh Shell merupakan simbol perlawanan dunia ketiga lainnya terhadap tirani kapitalisme global.

Ketiga, kemunculan gerakan perlawanan ini juga dimungkinkan oleh perkembangan apa yang disebut-sebut dengan *global governance*—tidak hanya dalam wujud ekspansi lembaga-lembaga formal antar pemerintah, tetapi yang terpenting dalam rupa wilayah publik transnasional yang terbentuk berkat peningkatan luar biasa jumlah organisasi non pemerintah. NGO bermanfaat dalam mengecam pemerintah yang tidak bertindak serius dalam menghadapi beberapa persoalan dasar kemanusiaan seperti degradasi lingkungan dan kemiskinan. Perkembangan jumlah NGO juga merangsang pembentukan koalisi aktivis yang mulanya terpusat pada beberapa isu spesifik seperti aktivisme kemanusiaan internasional lintas batas dan gerakan *No Sweats* di kampus-kampus di Amerika yang menentang eksploitasi pekerja di Dunia Ketiga.

Keempat, skandal hutang Dunia Ketiga menyediakan fokus isu lainnya bagi perlawanan. Aksi protes semacam *Jubilee 2000* memperlebar jaringan aktivis lewat keberhasilannya melibatkan gereja dan organisasi-organisasi lain yang sebelumnya tidak pernah tampil militan. Demonstrasi besar anti hutang pada pertemuan G8 di Birmingham pada 1998 dan di Cologne pada 1999 merupakan beberapa contoh kecil di luar Seattle dan Genoa.

Kelima, krisis finansial di Asia 1997-98 menjadi peristiwa penting yang tak terlupakan. Walau krisis ini berhasil dimanfaatkan para pembela WC untuk mencela keburukan kapitalisme kroni ala Asia, bagi kebanyakan orang krisis Asia mempertegas bahaya perekonomian dunia yang tidak terregulasi yang memungkinkan aliran kapital dalam jumlah luar biasa besar bisa menghancurkan perekonomian suatu negara hanya dalam semalam. Krisis Asia itu sendiri bersama langkah penyembuhan IMF yang sekedar menambahkan resep neo-liberal dengan dosis yang lebih tinggi membawa implikasi ideologis yang tak

kalah seriusnya. Sekelompok tokoh terkemuka seperti George Soros, Paul Krugman, Joseph Stiglitz dan Jeffrey Sachs tampil sebagai pusat kritik baru terhadap WC (Broad & Cavanagh, 1999). Pencopotan Stiglitz sebagai penasihat ekonomi Bank Dunia dan kritik para tokoh terkemuka ini menandai babak baru pemberontakan elit dan perlawanan dari dalam.

Proses penentangan terhadap kapitalisme global lebih dari sebatas kampanye aktivis dan unjuk rasa jalanan. Gerakan ini bisa dianggap berskala global karena semua protes tersebut telah berhasil menemukan artikulasi ideologi yang memadai dalam berbagai tulisan sederetan intelektual dan akademisi. Termasuk di dalamnya adalah Pierre Bourdieu. Sampai sebelum kematiannya pada Januari 2002, bersama *Raisons d'agir* Bourdieu menerbitkan semacam serial buku-buku murah, termasuk dua volume tulisannya, *Contre-feux* and *Contre-feux 2*. Noam Chomsky merupakan pemikir lainnya, seorang pengkritik setia terhadap politik luar negeri Amerika yang ia yakini sebagai upaya mengokohkan hegemoni negara tersebut bagi kepentingan beroperasinya kapitalisme global. Bersama dengan dua tokoh besar ini adalah sejumlah penulis dan intelektual lainnya yang memiliki ribuan pendengar dan pembaca seperti Michael Albert, Walden Bello, Susan George dan Toni Ngeri. Di belakangnya mengikuti generasi yang lebih muda seperti Naomi Klein dan Michael Hardt.

Kelahiran kembali gerakan dan diskursus anti kapitalisme boleh jadi sedang mengikis hegemoni yang telah dinikmati posmodernisme lebih dari dua dekade terhadap apa yang dicerca sebagai kelompok cara berpikir *avant-garde*. Salah satu tanda pergeseran intelektual ini adalah menurunnya obsesi terhadap isu-isu berbau kultural yang mendominasi dunia akademi radikal di era 1990an dan kembalinya "materi" dalam perbincangan. Sudah barang tentu perubahan yang sedang berlangsung tidak sehebat yang bisa dibayangkan. Akan tetapi bahkan seorang Rorty—yang ikut berjasa membuat posmodernisme mendapat penerimaan yang luas dalam budaya intelektual Amerika—pun akhir-akhir ini mulai mengecam kelompok yang ia istilahkan dengan *the cultural left* di Amerika karena ketidakpeduliannya dengan meningkatnya kesenjangan dalam masyarakat Amerika akibat globalisasi. Contoh lainnya adalah Slavoj Zizek, seorang teoritis kultural yang beraliran Lacanain, yang mulai berpaling ke Marx dan Lenin

(Callinicos 2003). Akan tetapi barangkali yang paling spektakuler adalah *No Logo* karya Naomi Klein. Dalam bukunya, Klein (2000: 122-24) menggambarkan betapa ketertarikan aktivis kampus seangkatannya pada *political identity* dan *political correctness* telah terperangkap dalam strategi korporasi besar untuk mengakumulasi kapital dengan cara mengkomodifikasi multikulturalisme. Klein menulis “[w]e were too busy analysing the pictures being projected on the wall to notice that the wall itself had been sold.”

Akan tetapi bagaimana sebaiknya gerakan perlawanan yang sedang mekar ini disebut? Apa nama yang tepat bagi protes-protes sosial yang muncul di Seattle sampai Cancun maupun di Genoa sampai Porto Alegre? Selama ini nama yang sering digunakan adalah gerakan anti-globalisasi. Namun ini adalah nama yang *absurd* karena mengabaikan karakter internasional dan kecenderungan gerakan yang melampaui batas nasional di seluruh lima benua yang ada di muka bumi. Beberapa figur terkemuka gerakan protes ini menolak istilah anti-globalisasi. Naomi Klein (2001: 87), misalnya, percaya “*it is not useful to use the language of anti-globalization.*” Dalam Forum Sosial Dunia pertama di Porto Alegre pada Januari 2001 Susan George (2001) menerangkan dengan tegas “*we are ‘pro-globalization’ for we are in favour of sharing friendship, culture, cooking, solidarity, wealth and resources.*”

Kebanyakan aktivis gerakan yang berasal dari Amerika bagian utara lebih suka membedakan antara globalisasi dari atas dan globalisasi dari bawah—perbedaan yang pertama kali dilakukan secara akademik oleh Richard Falk (2000). Globalisasi dari atas mencerminkan kolaborasi sejumlah negara penting di dunia dan agen-agen utama formasi kapital, sedang globalisasi dari bawah mencakup sederetan kekuatan sosial transnasional yang dipersatukan oleh kepedulian pada isu-isu seperti degradasi lingkungan, pelanggaran HAM dan patriarki. Sementara beberapa aktivis lain lebih suka menyebutnya dengan gerakan anti globalisasi neoliberal untuk memberikan konotasi yang khas tentang apa sebetulnya yang sedang ditentang. Alex Callinicos (2003) menggunakan gerakan anti-kapitalis untuk mempertegas kapitalisme sebagai musuh utama, sebagai sebuah penamaan yang menyerupai istilah *anti-systemic movement* yang digunakan Giovanni Arrighi, Terence Hopkins dan Immanuel Wallerstein.

Gerakan yang Penuh Ragam

Di satu sisi kesimpangsiuran nama dan istilah merefleksikan keberagaman dalam keyakinan, pendekatan dan strategi yang berkecamuk dalam gerakan perlawanan sosial itu sendiri. Namun di sisi lain kesimpangsiuran tersebut dipersatukan oleh apa yang sesungguhnya dilawan. Bila disederhanakan gerakan perlawanan sosial sejak Seattle melakukan penentangan terhadap empat hal (Gills 2000). *Pertama*, perlindungan terhadap kepentingan kapital dan ekspansi akumulasi modal dalam skala dunia. *Kedua*, kecenderungan ke arah penyeragaman kebijakan dan bentuk negara yang mengubah negara tak lebih dari komite eksekutif kepentingan modal dan proses akumulasinya dalam skala dunia melalui ideologi pasar bebas. *Ketiga*, formasi dan ekspansi lingkaran baru otoritas transnasional di atas negara-negara yang berfungsi mereproduksi fungsi utama negara sebagai pelayan kapital. *Keempat*, proses penyingkiran terhadap kekuatan-kekuatan sosial pembangkang dari arena pembuatan kebijakan negara dengan maksud men-desosialisasi isu-isu yang sedang dibahas sembari mengisolasi negara neo-liberal dari tekanan masyarakat. Tepatnya, gerakan sosial ini melawan kapitalisme yang dengan sengaja diglobalkan oleh model akumulasi yang fleksibel, kebijakan-kebijakan yang percaya pada tradisi neoklasik dan ideologi pasar bebas.

Walau gerakan melawan kapitalisme global memiliki musuh bersama, gerakan ini mencakup beragam solusi dan tawaran dunia alternatif. Media-media terkemuka mempertegas keberagaman ini dengan menunjuk sejumlah kekuatan yang berbeda-beda di balik berbagai aksi protes: *trade unionist* dan *crusties*, *revolutionary socialist* dan *autonomist*, aktivis NGO dan komunis, *peace campaigners* dan *black bloc*. Manfred Steger (2002) secara sederhana memanfaatkan pemilahan klasik “kanan” dan “kiri”. Kelompok kanan adalah para proteksionis nasionalis yang cenderung menyalahkan globalisasi sebagai biang penyebab timbulnya berbagai penyakit sosial, ekonomi dan politik yang menimpa masyarakat di negara asalnya. Merasa terancam oleh terkikisnya pola sosial lama dan cara hidup tradisional kelompok ini mencela perdagangan bebas, meningkatnya kekuatan investor global dan menuduh internasionalisme perusahaan-perusahaan multinasional dari negaranya sebagai perilaku yang tidak patriotik yang ikut menyumbang kerusakan sosial masyarakatnya sendiri. Takut akan

kehilangan hak menentukan nasib sendiri dan kehancuran budaya nasional, para proteksionis nasionalis menuntut keutuhan bangsa dan negaranya dari elemen-elemen asing. Kelompok ini lebih mempedulikan kesejahteraan warganya sendiri yang mengalami degradasi cukup signifikan sejak globalisasi membawa unsur-unsur asing atau membuat beberapa milik nasionalnya menjadi barang asing di negara lain. Menurut Steger para proteksionis nasionalis bisa ditemukan dalam diri figur-figur seperti Patrick Buchanan, Jorg Haidar, Jean-Marie Lepen, Gerhard Frey dan Gianfranco Fini. Steger juga memasukkan Hugo Chavez dalam kategori ini. Akan tetapi penggolongan Chavez sulit diterima. Sebab Presiden Venezuela tersebut bukan saja menjadi kontributor penting dalam Forum Sosial Dunia, tetapi telah tampil sebagai simbol perlawanan bersama terhadap kapitalisme global.

Di lain pihak kelompok kiri tak lain dari para egalitarian internasionalis. Kelompok ini mencakup partai-partai politik progresif dengan visi dunia yang lebih adil dan merata antara Utara dan Selatan dan berbagai NGO yang peduli dengan isu-isu lingkungan, HAM, buruh dan perempuan. Kelompok kiri menunjuk pada kemungkinan menyusun kembali kerangka ekonomi dan politik dunia yang berdasarkan distribusi kekayaan yang tidak timpang. Mereka menuduh para elit yang menjadi motor penggerak globalisasi telah memaksakan kebijakan-kebijakan neo-liberal yang menjadi sumber ketimpangan global, pengangguran, degradasi lingkungan dan matinya kesejahteraan sosial. Menghendaki globalisasi dari bawah terutama dengan cara memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan, para egalitarian internasionalis bermaksud mengambil alih proses globalisasi dari tangan para pengambil kebijakan neoliberal dan pemilik kapital. Steger memasukkan Ralph Nader sebagai salah satu tokoh terkemuka, khususnya di Amerika, dari kelompok kiri. Selain itu ia juga menyebut kelompok-kelompok pergerakan seperti Zapatista dan Chipko dan organisasi non pemerintah seperti *International Forum on Globalization*, *Global Exchange* dan *Focus on the Global South*.

Callinicos (2003) membuat pemilahan yang lebih lengkap. Setidaknya ia menyebut enam kelompok gerakan perlawanan. Pertama adalah kelompok reaksioner atau para *romantic anti-capitalism* meminjam istilah Lukacs. Kelompok ini memperjuangkan sebuah masyarakat baru berdasarkan kerinduan akan masa lalu yang ideal

tanpa sepenuhnya menolak modernitas. Ekspresi yang cukup jelas dari para reaksioner bisa ditemukan dalam ideologi kelompok kanan-jauh dalam politik Amerika yang memandang integrasi transnasional sebagai ancaman serius terhadap identitas Amerika sebagai bangsa "putih", "maskulin" dan "Kristen".

Kelompok gerakan kedua adalah para borjuis penentang kapitalisme. Bagi para aktivis borjuis seperti Noreena Hertz posisi ideologis mereka tidak anti-kapitalisme. Hertz (2001: 10) percaya "[c]apitalism is clearly the best system for generating wealth, and free trade and open capital markets have brought unprecedented growth to most if not all of the world." Akan tetapi soalnya, lanjut Hertz, dalam dua dekade terakhir perimbangan kekuatan antara politik dan pasar telah bergeser secara radikal ke arah yang menempatkan politik di bawah kendali pasar. Untuk itu perimbangan antara politik dan pasar harus dikembalikan pada titik normal agar korporasi besar tidak lagi menganggangi kekuasaan negara untuk kepentingannya. Korporasi itu sendiri bukan barang buruk. Sebaliknya Hertz *hakul yakin* dunia bisnis adalah agen terbaik keadilan sosial bagi negara-negara berkembang. Dia, oleh karenanya, bisa menerima privatisasi kesejahteraan asal dilakukan dengan benar. Selain itu tekanan dari bawah juga diperlukan untuk menjaga agar negara dan dunia bisnis tetap memegang tanggung jawabnya.

Callinicos menyebut kelompok gerakan perlawanan ketiga dengan istilah *localist anti-capitalism*. Kelompok ini mencakup aktivis dan intelektual yang memperjuangkan ekonomi pasar yang sudah diperbaharui dan lebih terdesentralisir sebagai jawaban terhadap berbagai penyakit yang ditimbulkan kapitalisme kontemporer. Para lokalis, diantaranya, menjadi pendukung setia *fair trade*. Gagasannya, konsumen di Utara harus mengutamakan hubungan dagang yang lebih adil dengan para produsen di selatan. *Fair trade* bersifat lokalis karena untuk menemukan keadilan gagasan ini tidak merasa perlu mentransformasi sistem yang sudah berjalan. Sebaliknya para lokalis percaya keadilan bisa diciptakan dengan mengembangkan hubungan yang *fair* pada level mikro di antara pelaku-pelaku pasar terutama hubungan langsung dengan para produser yang mendistribusikan produknya kepada para konsumen yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi—misalnya kepedulian pada kerusakan lingkungan. Para lokalis

mengajukan *localization* sebagai alternatif bagi globalisasi. Lokalisme ini mengingatkan pada pemikir sosialis abad 19 dari Perancis, Pierre Joseph Proudhon, yang percaya bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi menyebabkan hukum pasar tidak bisa bekerja dengan sempurna. Karenanya jika konsentrasi ini dikurangi dan kekuatan para produsen kecil dipulihkan maka mekanisme pasar akan menghasilkan keadilan sosial.

Keempat adalah kelompok reformis. Secara klasik gerakan buruh reformis mengacu pada strategi demokrasi sosial untuk menggapai sosialisme lewat cara parlementer. Beberapa pemikir demokrasi sosial kontemporer yakin sosialisme sudah tidak lagi menjadi alternatif yang memadai bagi kapitalisme. Untuk itu kelompok reformis berniat memansuikan dan mengatur kembali kapitalisme. Para reformis berbeda dengan para lokalis dari segi tekanannya pada aras internasional sebagai medan aksi utama. Akan tetapi yang jelas tujuan utama kelompok ini adalah membuat kapitalisme lebih terregulasi. James Tobin yang mengusulkan *Tobin Tax* merupakan salah satu contoh. Susan George adalah figur terkemuka lainnya yang menginginkan kembalinya strategi keynesianisme yang sudah diperbaharui bukan saja untuk Amerika dan Eropa tetapi juga untuk seluruh negara di dunia. Dalam keynesianisme yang mengglobal George membayangkan sebuah *Planetary Contract* yang dijalankan oleh sebuah lembaga internasional baru dan dibiayai dengan uang yang diperoleh dari kebijakan semacam *Tobin Tax* dan *Unitary Profits Tax* atas perusahaan-perusahaan transnasional. George juga mengusulkan semacam kartel penghutang internasional yang dapat mengancam dan mungkin mewujudkan gagasan pengemplangan hutang sebagai alat untuk menekan negara-negara kaya lembaga-lembaga keuangan internasional (Callinicos 2003).

Kelompok kelima mencakup para otonomis. Dengan menggunakan *tute bianche* di Italia dan *Zapatista* di Mexico sebagai sumber inspirasi utama, otonomisme menolak sentralisasi kekuatan dan justeru mengedepankan metode yang berbeda-beda dalam mengorganisir dan melakukan aksi sebagai kelebihan gerakan perlawanan itu sendiri. Toni Negri dan Michael Hardt adalah salah satu pelopor yang menteorisasi otonomisme. Menurut Hardt (Callinicos 2003) keberagaman gerakan perlawanan tak lain dari konsep politik yang "*not about what is, but about what could be.*" Dia menggambarkan

keberagaman tersebut sebagai "*singularities that act in common*" yang mencakup semua orang yang bekerja di bawah komando kapital dan "*analogous to the classical Marx concept of the proletariat,*" tetapi tanpa menyempitkan makna konsep ini pada konteks abad 19 dan 20. Naomi Klein dan Kevin Danaher adalah pendukung otonomisme lainnya. Danaher menyebut *coalition of coalitions* untuk menggambarkan model pengorganisasian protes yang berdasarkan pada konsensus tentang beragam metode yang berlainan (Callinicos 2003).

Terakhir adalah para sosialis. Sejak gerakan sosial 1968 sosialisme sudah tidak lagi menjadi alternatif yang memadai. Kemunduran tersebut mencapai puncaknya dengan kebangkrutan rezim-rezim otoriter di Eropa Timur di akhir 1980an. Walau begitu beberapa elemen sosialis di sekitar gerakan buruh dan organisasi revolusioner masih mampu bertahan. Akan tetapi sebagian besar sosialisme yang tersisa ini mewarisi tradisi Trotskyisme, terutama di Eropa Barat.

Berbagai Strategi dan Reaksi Kekuatan Dominan

Perlawanan terhadap kapitalisme global tergolong gerakan yang relatif baru. Meski begitu gerakan ini mulai menuai persoalan klasik yang hampir selalu dihadapi setiap gerakan sosial dalam dua abad terakhir. Persoalan tersebut adalah apakah perubahan sosial yang sedang diperjuangkan hendak dicapai dengan cara reformasi atau revolusi. Apakah tujuan gerakan ini adalah secara perlahan-lahan memanusiaikan sistem yang sedang berlaku atau merombaknya sama sekali. Robin Broad (2002) secara sederhana membedakan antara kelompok yang ingin *me-reshape* dan *me-roll back* globalisasi ekonomi. Kelompok pertama hendak menulis ulang tatanan ekonomi global dengan tujuan memperkuat perlindungan dan memuliakan pekerja, perempuan, penduduk asli dan pelestarian lingkungan. Sedangkan kelompok kedua ingin menghentikan beberapa aspek globalisasi seperti perdagangan bebas yang diterapkan pada sumber daya alam milik bersama yang mulanya bersifat non ekonomis semacam air atau arus perpindahan kapital tanpa kendali melampaui batas-batas nasional. Tarik menarik antara reformasi dan revolusi tampak semakin rumit dari sudut beberapa isu kontemporer yang dihadapi gerakan anti kapitalisme global.

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir beberapa kelompok dominan yang bersuara atas nama kepentingan kapitalisme global mulai membuka ruang dialog. Salah satu bentuknya adalah upaya IMF dan Bank Dunia mengajak bicara para pengkritiknya terutama setelah krisis finansial di penghujung 1990an. Sudah tentu dialog semacam ini tidak berhasil melemahkan momentum gerakan perlawanan. Sebaliknya, menurut Callinicos (2003: 87) debat yang terjadi antara perwakilan kapiatlisme global dan para aktivis perlawanan seperti yang berlangsung sebelum pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Pargue September 2000 dan dalam pertemuan Forum Sosial Dunia pertama di Januari 2001 hanya memperkuat keyakinan gerakan bahwa *"their opponents are morally and intellectually bankrupt"*. Walau begitu beberapa NGO dalam jumlah yang cukup berarti bersedia terlibat dalam pembicaraan serius yang ditawarkan perwakilan-perwakilan kapitalisme global. Sebuah keputusan yang menuai kecaman yang luas dari sesama aktivis perlawanan. Patrick Bond (2000: 66) menyebutnya *"a terribly dangerous tendency amongst the more conservative ...NGOs and environmental groups—some even decisively call them Co-Opted NGOs or Co-NGOs—to cut pragmatic yet ultimately absurd and untenable deals with the establishment"*. Bahkan kecaman yang lebih pedas menuduh NGO-NGO sejenis ini sebagai pelayan imperialisme.

Akan tetapi sesungguhnya hampir semua NGO selalu berada dalam posisi yang ambigu. Secara umum NGO kerap didudukkan sebagai elemen kunci masyarakat sipil. Dalam popularitas diskursus demokrasi liberal di era 1980an dan 1990an anggapan seperti ini merujuk pada semua organisasi dan lembaga sosial yang menempati wilayah yang tidak berada di bawah kendali negara maupun pasar dan karenanya diyakini memiliki kemampuan mengambil sikap dan tindakan yang independen. Akan tetapi dalam praktiknya justeru independensi menjadi hal yang selalu diperdebatkan. Privatisasi besar-besaran dalam bantuan asing berkat pengaruh neo-liberalisme menjelmakan NGO sebagai agen penyalur dana-dana negara. Di saat bersamaan penurunan yang cukup signifikan dalam anggaran bantuan negara-negara Barat memaksa banyak NGO bersaing satu sama lain memperebutkan donatur swasta, yang ironinya sering kali dilakukan dengan strategi menampilkan gambaran-gambaran menyedihkan di berbagai media untuk meningkatkan publisitas. Salah satu produk tragis

dari posisi ambigu ini bisa dilihat dalam aksi yang diselenggarakan NGO seperti *Medecins sans Frontiers* meminta bantuan intervensi militer negara-negara Barat untuk mendukung operasinya di Afrika dan Balkan.

Kedua, selain mengajak bicara perwakilan kapitalisme global juga memilih langkah-langkah drastis dan represif. Tindakan represif tampak jelas dalam reaksi keras polisi Italia menghadapi demonstrasi nir kekerasan *tute bianche* di Genoa. Sementara UU anti terorisme yang disahkan parlemen-parlemen di Amerika, Inggris dan negara-negara Barat penting lainnya mencerminkan ancaman jangka panjang terhadap setiap aktivis yang terlibat dalam aksi apa saja yang bisa dituduh mengganggu dan membahayakan keamanan dalam negeri. Akan tetapi yang terpenting, setelah aksi yang melibatkan kekerasan di Genoa muncul perdebatan penting dalam tubuh gerakan anti kapitalisme global. Kenyataannya negara dan aparatnya akan selalu tergoda menggunakan kekerasan paling tidak sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan kepentingan kapital. Persoalannya bagaimana kekerasan negara harus dihadapi: apakah dengan melawannya dengan kekerasan yang setimpal ataukah dengan menyudahi sama sekali semua aksi protes yang memudahkan para aktivis tercebur dalam kekerasan yang sengaja diciptakan oleh aparat keamanan dan kelompok-kelompok sempalan semacam *Black Bloc*—yang diyakini telah disusupi agen intelijen. Selain itu pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana gerakan perlawanan ini harus menghadapi kekuatan negara yang tersentralisir: apakah dengan cara membangun sentralisme dan otoriterisme yang serupa untuk menjamin militansi gerakan ataukah dengan cara-cara yang lebih demokratik dan menekankan pluralitas aksi.

Ketiga, jika Genoa menampilkan wajah negara yang represif pada level domestik maka perang di Afganistan dan Irak mempertegas dimensi kekerasan tersebut pada aras internasional. Kejadian 11 September membawa dua implikasi yang berlawanan. Kejadian itu di satu sisi mempersatukan dan membuka jalan bagi kekuatan-kekuatan dominan yang mewakili kapitalisme global, terutama Pemerintah Amerika dan Inggris, memanipulasi isu terorisme untuk mengambil tindakan tegas kepada setiap pembangkang yang secara sepihak bisa dinilai tidak patriotis atau bahkan mengancam kehidupan dunia yang damai. Di sisi lain 9/11 melemahkan dan memojokkan gerakan-gerakan perlawanan. Walden Bello telah berulang kali mengingatkan para aktivis

untuk tidak meninggalkan aksi dan protes jalanan (Callinicos 2003). Sayangnya, seruan tersebut tak mampu menahan laju keberhasilan pertemuan WTO pasca 9/11 di Doha pada bulan November 2001.

Walau begitu perang di Afganistan dan Irak juga bisa dimaknai sebagai momentum baru perluasan gerakan melawan kapitalisme global. Kedua perang atas nama terorisme ini telah memperluas gerakan anti kapitalisme global menjadi sekaligus gerakan anti perang dan gerakan solidaritas bagi kelompok-kelompok tertindas seperti masyarakat Palestina. Bello (Callinicos 2003) dalam berbagai gagasannya secara tersirat menunjukkan kesadaran yang kuat tentang ketidakterpisahan antara imperialisme dan kapitalisme global dan, karenanya, oposisi terhadap neo-liberalisme dan oposisi terhadap militerisme dan perang. Namun dalam tubuh gerakan perlawanan sendiri berlangsung debat klasik tentang isu ini. Bertolak belakang dengan itu kelompok reformis, diantaranya, percaya perlawanan terhadap korporasi besar harus dibedakan dari perlawanan terhadap penggunaan kekerasan militer. Argumen ini mencerminkan keyakinan lama yang menginginkan pembedaan tegas antara politik dan ekonomi ketimbang melihatnya sebagai kedua aspek yang tak terpisahkan dan sebuah keutuhan yang menyeluruh.

Keempat, sejak 9/11 struktur ekonomi dan politik global berada di bawah dominasi gabungan militerisme dan perang melawan terorisme di satu sisi dan korporasi global dan neoliberalisme di sisi lain. Koalisi dominan ini menambah daftar kesulitan para aktivis anti kapitalisme global dalam memilih strategi perlawanan yang paling tepat. Persoalan dimulai dari bagaimana keterpilahan struktur global harus diterjemahkan. Toni Negri (Callinicos 2003) diantaranya, memilih strategi yang ia gambarkan sebagai desersi dan eksodus. Secara garis besar strategi Negri berdekatan dengan gagasan para lokalisis menciptakan jaringan produksi dan distribusi alternatif di luar hubungan-hubungan ekonomi yang dominan. Akan tetapi soalnya, desersi dan eksodus tidak berbuat apa-apa terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan pemilik modal dan negara yang beraliansi dengannya. Padahal konsentrasi kekuasaan ini merupakan sasaran utama perlawanan gerakan anti kapitalisme global. Belum lagi ketimpangan distribusi sumber daya membuat setiap upaya membangun alternatif selalu berada di bawah bayang-bayang upaya

kapitalisme global untuk terus menundukkan setiap wilayah sosial yang masih terbebaskan.

Senada dengan itu Colin Hines (2000: 72) mengaskan "*TNCs...will use their financial and political might to counter this form of localization, since it significantly undermines their power base.*" Sebagai gantinya Hines menganjurkan para aktivis berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan di negara-negara maju. Hines (2000: 72) yakin "*[t]he power centres of international business are still nationally embedded...*" Karena itu "*[t]heir controlling operations are...not beyond the reach of national and economic bloc regulation.*" Akan tetapi lagi-lagi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan para gerakan perlawanan untuk melemahkan komitmen negara-negara bangsa terhadap WC?

Bagi Callinicos (2003) kedua persoalan di atas tidak bisa dijawab tanpa mempertimbangkan struktur kapitalisme kontemporer. Gerakan melawan globalisasi kapital lebih dari segalanya adalah perlawanan terhadap keberlanjutan dan peningkatan kesenjangan sosioekonomi di tingkat global maupun domestik. Dulunya kesenjangan semacam ini dikonseptualisasikan lewat berbagai teori tentang kelas. Akan tetapi kekalahan tragis organisasi kelas pekerja di Utara dalam seperempat abad terakhir meyakinkan banyak orang bahwa konsep kelas sudah tidak bisa digunakan lagi untuk memahami dan menjelaskan masyarakat kontemporer. Posmodernisme barangkali merupakan salah satu upaya paling serius untuk menteorisasikan keyakinan ini dengan menggambarkan dunia yang fragmentatif dengan individu-individu yang selalu bergerak yang membentuk identitas-identitas yang plural dan selalu berubah dan tercerabut dari akar hubungan-hubungan produksi. Konsep *multitude* yang digunakan Negri dan Hardt merupakan sebuah kompromi. *Multitude* adalah semacam gerakan para proletar yang dikonseptualisasikan dengan mengadopsi tema-tema posmodernisme seperti *plurality* dan *multiplicity* dalam sebuah kerangka yang mempercayai setiap subyektifitas yang berlainan bisa bertindak secara bersama-sama.***

Daftar Pustaka

- Anderson, P. (2000). 'Renewals.' *New Left Review* (II) 1.
- Barlow, M. dan Clarke, T. (2002). *Global Showdown*. Toronto: Stoddart.
- Bond, P. (2000). 'Their Reforms and Ours.' Dalam W. Bello et.al (eds.), *Global Finance*. London: Zed Books.
- Broad, R. dan Cavanagh, J. (1999). 'The Death of Washington Consensus.' *World Policy Journal*. Vol. 16, No. 3.
- Callinicos, A. (2001). *Against the Third Way*. Cambridge: Polity Press.
- Callinicos, A. (2003). *An Anti-Capitalist Manifesto*. Cambridge: Polity Press.
- Cox, R. (1997). 'Democracy in Hard Times: Economic Globalization and the Limits of Liberal Democracy.' Dalam A. McGre (ed.), *The Transformation of Democracy?* Cambridge: Polity Press.
- Falk, R. (2000). 'Resisting "Globalization-from-above" through "Globalization-from-below".' Dalam B.K. Gills (ed.), *Globalization and the Politics of Resistance*. Basingstoke: Palgrave.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- George, S. (2000). 'A Short History of Neoliberalism.' Dalam W. Bello et.al (eds.), *Global Finance*. London: Zed Books.
- George, S. (2001). *Que faire a Present?*. Text for the first World Social Forum, Porto Alegre, 15 January 2001
- Gill, S. (2003). *Power and Resistance in the World Order*. Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Gills, B.K. (2000). 'Introduction: Globalization and the Politics of Resistance.' Dalam B.K. Gills (ed.), *Globalization and the Politics of Resistance*. Basingstoke: Palgrave

- Hayden, T. ed. (2002). *The Zapatista Reader*. New York: Last Gasp.
- Held, D. dan McGrew, A. eds. (2000). *The Global Transformation Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Held, D. dan McGrew, A. (2002). *Globalization/Anti-Globalization*. Cambridge: Polity Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. dan Perraton, J. (1999). *Global Transformation*. Stanford: Stanford University Press.
- Hertz, N. (2001). *The Silent Take Over*. London: Heinemann.
- Hines, C. (2000). *Localization: A Global Manifesto*. London: Earthscan Publications.
- Hoogvelt, A. (2001). *Globalization and the Postcolonial World*. Basingstoke: Palgrave.
- Klein, N. (2000). *No Logo*. Toronto: Alfred A Knopf.
- Klein, N. (2001). 'Reclaiming the Commons.' *New Left Review* (II) 9
- Marcos, S. (2002). 'The Fourth World war has Begun.' Dalam T. Hayden (ed.), *The Zapatista Reader*. New York: Last Gasp.
- Steger, M.B. (2002). *Globalism*. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.